TEMPO

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DKI Kembalikan Kerugian ke Kas Daerah

Erwan Hermawan

erwan.hermawan@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta akan mematuhi semua rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, termasuk mengembalikan uang kerugian ke kas daerah. "Yang dikembalikan adalah berindikasi kerugian," kata Kepala Inspektorat, Lasro Marbun, saat dihubungi kemarin.

Pada Senin pekan lalu, BPK menyampaikan hasil auditnya di depan sidang paripurna. Setelah memeriksa laporan keuangan pemerintah DKI 2014, lembaga auditor itu mengungkapkan ada 70 temuan senilai Rp 2,16 triliun. Dari temuan tersebut, salah satunya ada yang berindikasi kerugian daerah sebesar Rp 442,37 miliar.

Lasro menargetkan 80 persen dari kerugian itu akan dikembalikan segera, sebelum batas waktunya. BPK memberi tenggat selama 60 hari kerja kepada pemerintah DKI untuk menyelesaikan semua rekomendasi.

Lasro mengatakan belum menelaah lebih lanjut mengenai adanya unsur pidana dalam laporan BPK itu. Saat ini pihaknya berfokus pada proses pengembalian uang ke kas daerah. "Nanti kami pilah lagi," ucapnya.

Namun, berdasarkan temuan, kata Lasro, ada beberapa satuan kerja perangkat daerah yang diberi catatan karena diduga menggelembungkan anggaran. Beberapa satuan kerja perangkat daerah itu di antaranya Badan Kepegawaian Daerah; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Pelayanan Pajak; Dinas Bina Marga; Dinas Sosial; Dinas Olahraga dan Pemuda; Dinas Perhubungan dan Transportasi; serta UPT Transjakarta.

Ia berharap semua satuan kerja perangkat daerah mematuhi rekomendasi BPK. Ke depan, ujar dia, semua perangkat daerah turut membangun pengelolaan keuangan yang lebih transparan, sehingga pemerintah bisa mendapat opini yang lebih bagus dari wajar dengan pengecualian, seperti sekarang.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah menempuh segala cara agar hasil audit keuangan pemerintah DKI dari BPK menuai hasil yang optimal. Bahkan tahun lalu ia sampai merekrut dua pegawai BPK. "Saya coba biar laporan DKI sesuai dengan kemauan BPK. Dua anggota mereka juga saya rekrut," ucap dia, Kamis pekan lalu.

Nyatanya, lembaga audit itu tetap memberikan rapor merah kepada Basuki. BPK memberi predikat opini "wajar dengan pengecualian", sama seperti tahun sebelumnya. Dan Basuki pun kembali harus memperbaiki kinerja keuangan pemerintah DKI yang kembali diberi catatan oleh BPK.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta bakal membentuk tim investigasi independen untuk mengkaji hasil audit BPK. "Semua kami tinjau ulang, dari pengeluaran sampai kepemilikan aset," kata Ketua DPRD, Prasetyo Edi Marsudi.

Tim investigasi ini, ujar dia, dibantu oleh auditor profesional. Hasil kajian tim kemudian akan diberikan ke tiap komisi sesuai dengan permasalahannya. Ia juga tak menutup kemungkinan memanggil gubernur jika memang hasil temuan tim merekomendasikan itu.

Dari semua temuan BPK, kata Prasetyo, DPRD berfokus pada masalah kepemilikan aset. Sebab, dalam audit disebutkan, banyak aset yang jatuh ke tangan pihak ketiga.

● RAYMUNDUS RIKANG

TEMPO

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEJUMLAH satuan kerja perangkat daerah mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan atas kinerja keuangannya pada anggaran 2014. Dinas Pendidikan paling banyak disorot dalam laporan BPK yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Senin pekan lalu itu.

Beberapa proyek di Dinas Pendidikan dianggap bermasalah oleh BPK. Bahkan, sebelum audit keluar, sejumlah proyek berindikasi korupsi telah ditangani oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, seperti kasus pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) sebesar Rp 330 miliar. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan Alex Usman dan Zaenal Soeleman selaku pejabat pembuat komitmen sebagai tersangka.

Berikut ini beberapa satuan kerja perangkat daerah yang harus mengembalikan uang kerugian ke kas daerah:

- Dinas Pendidikan, dana Bantuan Operasional Sekolah: Rp 469.507.016.
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Bencana, pengadaan Heavy Duty Hydraulic Platform: Rp 2,9 miliar.
- Dinas Pendidikan, pengadaan UPS: Rp 3,1 miliar.
- Dinas Pertamanan dan Pemakaman, pengadaan 13 jenis pohon: Rp 188.028.000.
- Dinas Pendidikan, program Kartu Jakarta Pintar: Rp 2,2 miliar.

SUMBER: BPK